

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2023**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MANGGARAI**

JL. Ahmad Yani No. 11 (0385) 22120



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai sebagaimana yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai ini memuat sejumlah informasi tentang capaian implementasi program dan kegiatan baik secara kuantitatif (angka dan persentase), keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Output dan dampak dari program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana termuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini juga memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan termasuk mobilisasi sosial dan kemitraan multi pihak dengan berbagai *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diharapkan dapat menjadi input penting dalam menyusun rancangan kebijakan pembangunan kesehatan kedepannya berdasarkan pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dapat melengkapi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023.

Ruteng, Maret 2024



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Manggarai,

drg. Bartolomeus Hermopan
Pembina

NIP.19760430 200903 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	5
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	10
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KESEHATAN	12
2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Dinas Kesehatan	12
2.2 Akuntabilitas Kinerja OPD	14
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	15
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas pembantuan dari Kementerian/lembaga yang Ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten/Kota.	30
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas Pembantuan Dari Daerah Provinsi yang Ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten/Kota	30
3.3 Permasalahan dan Kendala	
3.4 Saran dan Solusi	
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM KESEHATAN	31
4.1 Urusan Kesehatan	31
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	31
4.1.2 Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh OPD	33
4.1.3 Anggaran dan Realisasi	34
4.1.4 Dukungan Personil.....	35
4.1.5 Permasalahan dan Solusi A. Permasalahan	38
4.2 Program dan Kegiatan Serta Realisasi Tahun Anggaran 2023	43
BAB V PENUTUP	51
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi anggaran pendapatan dan belanja OPD.....	4
Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023.....	4
Tabel 1.3 Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2022.....	7
tabel 2.1 Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2022.....	13
Tabel 2.2 Target Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten manggarai tahun2023.....	20
Tabel 2.3 Capaian Kinerja dibandingkan target kinerja Tahun 2023.....	21
Tabel 2.4Jumlah Kematian Ibu menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Manggarai Tahun 2023.....	21
Tabel 2.5 Jumlah Kematian Bayi menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Manggarai Tahun2023.....	27
Tabel 2.6 Sepuluh Patron penyekait terbanyak di Kabupaten Manggarai Tahun 2023.....	30
Tabel 2.7 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	32
Tabel 4.1Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2023	38
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2023	34
Tabel 4.3Data tenaga PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Keadaan Desember 2023.....	41
Tabel 4.4Realisai Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai ini adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Kesehatan.

LPPD Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai ini memuat sejumlah informasi tentang capaian implementasi program dan kegiatan baik secara kuantitatif (angka dan persentase), keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Output dan dampak dari program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana termuat dalam LPPD ini juga memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan termasuk mobilisasi sosial dan kemitraan multipihak dengan berbagai stakeholder pembangunan di Kabupaten Manggarai.

Karena itu, LPPD sebagai salah satu sarana evaluasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan ini diharapkan menjadi input penting dan bermanfaat dalam menyusun rancangan kebijakan pembangunan kesehatan kedepannya berdasarkan pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-undang/ Dasar Hukum ;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 04);
7. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 062).

b. Data geografis wilayah;

Batas- batas wilayahnya, yaitu:

- Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat
- Utara berbatasan dengan Laut Flores
- Selatan berbatasan dengan Laut Sawu.

Luas wilayah Kabupaten Manggarai 1.915,62 km², dari aspek administrasi Pemerintahan.

c. Jumlah Penduduk;

Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2023 sebanyak 333.730 Jiwa.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

Kabupaten Manggarai terdiri dari 12 kecamatan yang meliputi 145 Desa dan 26 Kelurahan.

e. Jumlah UPTD dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Pemenuhan akan pelayanan kesehatan lewat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sampai dengan tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Puskesmas.
Ketersediaan sarana Puskesmas sampai dengan tahun 2023 sebanyak 25 Unit (11 Unit Puskesmas Rawat Inap dan 14 Unit Puskesmas Rawat Jalan).
- Puskesmas Pembantu.
Jumlah Puskesmas Pembantu sampai dengan tahun 2023 sebanyak 60 Unit.
- Poskesdes.
Jumlah Poskesdes sampai dengan tahun 2023 sebanyak 90 Unit.
- Polindes.
Jumlah Polindes sampai dengan tahun 2023 sebanyak 22 Unit.
- Puskesmas Keliling Roda 4.
Puskesmas Keliling Roda 4 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 25 unit, tidak mengalami perubahan.
- Ambulance Transport Puskesmas.
Ambulance Transport Roda 4 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 13 unit.
- Mobil Promosi Kesehatan
Mobil Promosi Kesehatan Tahun 2023 sebanyak 1 unit

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja OPD.

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai melaksanakan 5 Program dan 13 Kegiatan dengan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 172.103.296.138,- dengan rincian sbb:

Tabel 1.1. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja OPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
-1	-2	-3	-4	-5
1	Belanja Operasi	149.716.345.286	130.011.834.791	86,8
	Belanja Pegawai	57.505.150.190	52.886.589.858	91,97

	Belanja Barang & Jasa	79.879.378.496	65.101.439.833	81,50
	Belanja Hibah	350.000.000	325.000.000,00	92,9
	Belanja Bantuan Sosial	11.981.816.600	11.698.805.100	97,6
2	Belanja Modal	22.386.950.852	20.331.082.467	90,82
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.766.919.802	14.787.314.632	88,19
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.047.349.050	3.985.567.835	98,47
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.572.682.000	1.558.200.000	99,08
	TOTAL	172.103.296.138	150.342.917.258	87,36

Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023

No.	Puskesmas	Target	Realisasi	%
1	Cancar	25.000.000	14.276.000	57,10
2	Ketang	10.000.000	12.822.000	128,22
3	Nanu	12.000.000	10.400.000	86,67
4	Wangko	10.000.000	14.410.000	144,10
5	Kota	48.000.000	53.067.500	110,56
6	Watu Alo	8.000.000	4.385.500	54,82
7	Timung	10.000.000	9.222.000	92,22
8	Pagal	15.000.000	21.050.000	140,33
9	Wae Codi	10.000.000	4.925.700	49,26
10	Bea Mese	15.000.000	8.865.000	59,10
11	Reo	35.000.000	32.609.000	93,17
12	Wae Kajong	12.000.000	4.519.500	37,66

13	Iteng	25.000.000	14.665.000	58,66
14	Narang	25.000.000	26.632.000	106,52
15	Langke Majok	12.000.000	12.217.500	101,81
16	Ponggeok	15.000.000	13.710.000	91,4
17	Wae Mbeleng	22.555.000	20.983.000	93,03
18	Bangka Kenda	15.000.000	10.195.000	67,97
19	Loce	10.000.000	11.608.000	116,08
20	Lao	45.000.000	27.154.000	60,34
21	Dintor	10.000.000	6.190.000	61,9
22	Todo	8.000.000	10.285.000	128,56
23	Anam	7.000.000	3.290.000	47
24	Langgo	5.000.000	1.980.000	39,6
25	Lemarang	3.000.000	1.205.000	40,17
I. Jumlah Retribusi Umum		412.555.000	350.666.700	85,00
1	Labkesling Dinkes	175.000.000	45.708.100	26,12
2	Dana JKN Non Kapitasi	2.453.831.714	2.578.300.905	105,07
3	Dana JKN di FKTP	16.569.856.723	15.764.521.920	95,14
4	Prolanis	386.800.000	188.646.100	48,77
II. Jumlah Dana JKN		19.585.488.437	18.577.177.025	94,85
TOTAL (I+II)		19.998.043.437	18.927.843.725	94,65

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis OPD;

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kesehatan di daerah, Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan antara lain:

1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
2. Masih rendahnya status gizi masyarakat

3. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular di masyarakat
4. Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
5. Masih rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
6. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan
7. Belum optimalnya sistem informasi kesehatan integrasi
8. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
9. Belum optimalnya pelaksanaan program JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

b. Visi dan Misi Dinas Kesehatan;

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai “*Masyarakat Manggarai Sehat yang Mandiri dan Berkualitas*”.

Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai adalah :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat Manggarai melalui upaya kesehatan masyarakat dan perorangan
2. Melindungi kesehatan masyarakat Manggarai dengan meningkatkan program pemberdayaan masyarakat
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan yang berkualitas di Kabupaten Manggarai
4. Menciptakan tata kelola organisasi Dinas Kesehatan yang baik bersih dan melayani.

c. Program OPD berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman
4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

d. Kegiatan OPD Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai menjalankan 5 Program dan 13 Kegiatan dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.2 Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2023

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
				5	Penyediaan Bahan/Material		
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
						2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
7	Pengadaan Obat, Vaksin						
8	Pengadaan Bahan Habis Pakai						

			9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			10	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
			15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
			17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
			18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
			19	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
			20	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

				21	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat non kapitasi
				22	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kapitasi
				23	Operasional Pelayanan Puskesmas
				24	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				25	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
				26	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk makanan Minuman tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan ke lima urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurang-kurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Standar Teknis SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan promotif dan preventif, sementara program JKN berfokus pada pelayanan kuratif dan

rehabilitatif. Sehingga pada penerapan SPM bidang kesehatan khususnya di Kabupaten/Kota ada kontribusi pembiayaan dan pelayanan program JKN.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KESEHATAN

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Dinas Kesehatan

Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup, Angka Kesakitan penduduk dan kecamatan melaksanakan STBM GESI menjadi indikator utama Dinas Kesehatan

tabel 2.2 Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkanya Derajat Kesehatan Masyarakat	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	75,2/100.000 KH	215,48/100.000 KH (12/5.569)	-86,54
		Menurunkan Angka Kematian bayi (AKB)	11,8/1.000 KH	15,98/1.000 KH (89/5.569)	64,57
		Menurunkan Angka Kesakitan	21,8%	22,54% 0/330.730	96,59
		Menurunkan Angka Kematian Anak dan Balita	0/1.000 KH	0	100%
		Persentase Kecamatan Terverifikasi Melaksanakan 5 Pilar STBMGESI	100%	0	0%

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Hasil

NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung Rumah Sakit Rujukan $\times 100\%$ =	258	0,08%
		Jumlah Penduduk di Kabupaten	333.730	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi $\times 100\%$ =	2	100,00%
		Jumlah RS di Kabupaten	2	
3	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan $\times 100\%$ =	2223	0,67%
		Jumlah Penduduk Kabupaten	333.730	
4	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan $\times 100\%$ =	4.877	89,39%
		Jumlah ibu hamil di Kabupaten	5.456	

5	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	$\times 100\%$ =	5.061	90,28%
		Jumlah ibu bersalin di Kabupaten		5.606	
6	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	$\times 100\%$ =	5.569	100,00%
		Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten		5.569	
7	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	$\times 100\%$ =	24.282	89,82%
		Jumlah balita di Kabupaten		27.034	
8	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	$\times 100\%$ =	87.696	89,41%
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten		98.084	
9	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\times 100\%$ =	129.579	87,89%
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten		147.431	
10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\times 100\%$ =	13.383	54,51%
		Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten		24.550	
11	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\times 100\%$ =	14.950	104%
		Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten		14.415	
12	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\times 100\%$ =	1.646	117%
		Jumlah penderita DM di Kabupaten		1.411	
13	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\times 100\%$ =	887	69,24%
		Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten		1.281	
14	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\times 100\%$ =	434	21%
		Jumlah terduga penderita TBC di Kabupaten		2057	

15	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\times 100\%$ =	7.140	83,08%
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten		8.594	
16	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	$\times 100\%$ =	158	92%
		Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan		171	
17	Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu	$\times 100\%$ =	98	100,00%
		Jumlah seluruh balita gizi buruk/stunting yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama		98	
18	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DB	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn	$\times 100\%$ =	67	100,00%
		Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama		67	
19	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	$\times 100\%$ =	12	215,48
		Jumlah Lahir Hidup		5569	

2.2 Akuntabilitas Kinerja OPD

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023;

Tabell 2.2 Target Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten manggarai taahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkanya Derajat Kesehatan Masyarakat	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	75,2/100.000 KH
		Menurunkan Angka Kematian bayi (AKB)	11,8/1.000 KH
		Menurunkan Angka Kesakitan	21,80%
		Menurunkan Angka Kematian Anak dan Balita	0/1.000 KH
		Persentase Kecamatan Terverifikasi Melaksanakan 5 Pilar STBMGESI	100%

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja;

Tabel 2.3 Capaian Kinerja dibandingkan target kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	<i>Meningkanya Derajat Kesehatan Masyarakat</i>	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	76,05/ 100.000 KH	116,49/ 100.000 KH	47,72	75,2/100 .000 KH	215,48/ 100.000 KH	-86,54
		Menurunkan Angka Kematian bayi (AKB)	12,36/ 1.000 KH	16,31/ 1.000 KH	68,48	11,8/1.0 00 KH	15,98/ 1.000 KH	64,57
		Menurunkan Angka Kesakitan	22,7%	23,76	95,28	21,8%	22,54%	96,59
		Menurunkan Angka Kematian Anak dan Balita	0/1.000KH	0/1.000 KH	100	0/1.000 KH	0/1.000 KH	100
		Persentase Kecamatan Terverifikasi Melaksanakan 5 Pilar STBMGESI	2 Kec	16,67%	16,67	100%	0	0
Rata-Rata			65,64			35,11		

Capaian Indikator kinerja dinas kesehatan kabupaten Manggarai tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

1) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian ibu menjadi salah satu indikator utama pembangunan kesehatan di Kabupaten Manggarai sehingga menjadi gambaran dari keberhasilan program pembangunan kesehatan dan penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan.

Kematian ibu menurut WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Manggarai pada Tahun 2023 tersebar pada beberapa Puskesmas di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Jumlah Kematian Ibu menurut Kecamatan dan Puskesmas
di Kabupaten Manggarai Tahun 2023**

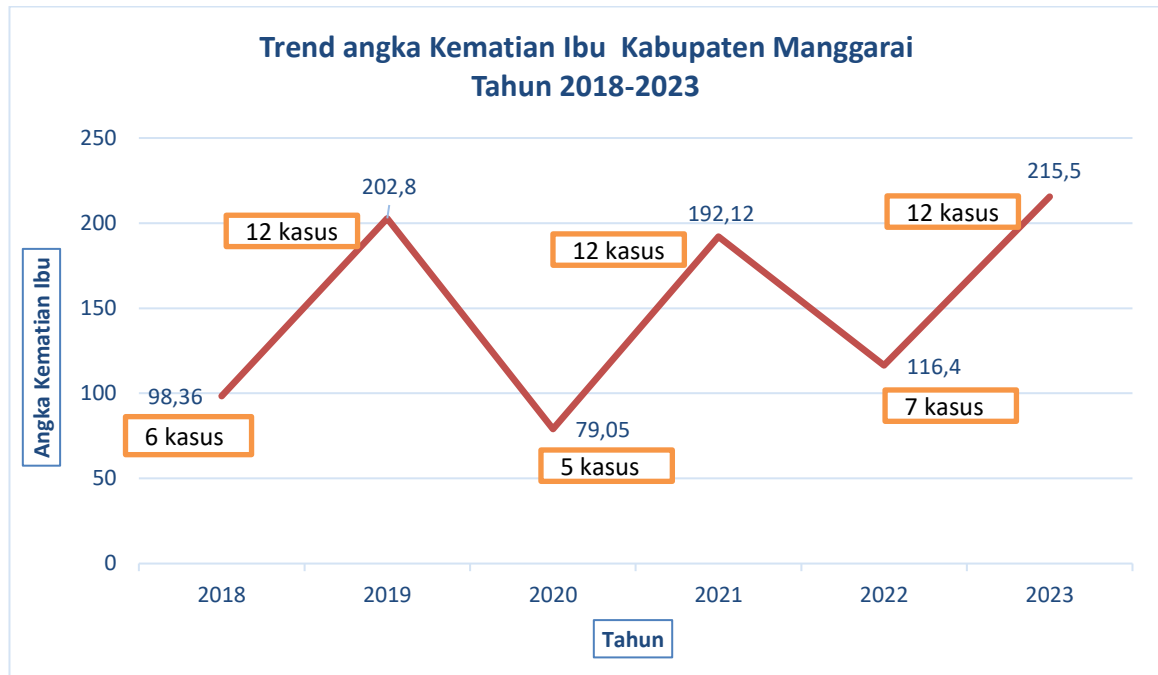
NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	JUMLAH KASUS	DESA
1	Ruteng	Cancar	275	0	
		Wae Mbeleng	225	0	
		Anam	156	1	Bulan
2	Rahong Utara	Nanu	209	2	Bangka Ruang, Buar
		Wangko	191	0	
3	Lelak	Ketang	196	0	
4	Wae Ri'i	Watu Alo	100	0	
		Bangka Kenda	255	0	
		Timung	163	0	
5	Langke Rembong	Kota	577	2	Satar Tacik
		Lao	481	0	
6	Cibal	Pagal	331	0	
		Bea Mese	165	0	
7	Cibal Barat	Wae Codi	329	1	Wae Renca
8	Reok	Reo	371	0	
9	Reok Barat	Wae Kajong	84	0	
		Loce	96	0	
		Lemarang	84	0	
10	Satar Mese	Iteng	175	3	Legu, Iteng, Tal
		Ponggeok	317	1	Ngkaer
		Langgo	112	1	Satar Loung
11	Satar Mese Barat	Narang	149	0	

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	JUMLAH KASUS	DESA
		Dintor	149	1	Ceka Luju
12	Satar Mese Utara	Langke Majok	237	0	
		Todo	142	0	
	TOTAL		5569	12	
Angka Kematian Ibu (AKI)			$12/5569 \times 100000 = 215.5$		

Sumber Data: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Manggarai

Tabel di atas menunjukkan jumlah kasus kematian Ibu terbanyak terjadi di wilayah kerja Kecamatan Satar Mese sebanyak 5 kasus yaitu Puskesmas Iteng 3 Kasus, Puskesmas Langgo 1 Kasus dan Puskesmas Ponggeok 1 kasus. Jumlah kasus kematian ibu di kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Rahong Utara (Puskesmas Nanu sebanyak 2 kasus), Kecamatan Langke Rembong (Puskesmas Kota sebanyak 2 kasus) Kecamatan Cibal Barat (Puskesmas Wae Codi sebanyak 1 Kasus), Kecamatan Ruteng (Puskesmas Anam sebanyak 1 kasus) dan Kecamatan Satar Mese Barat (Puskesmas Dintor sebanyak 1 kasus). Kasus kematian ibu tidak ditemukan pada 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Satar Mese Utara, Kecamatan Lelak, Kecamatan Reok, Kecamatan Reok Barat, Kecamatan Cibal dan Kecamatan Wae Ri'l, sepanjang Tahun 2023.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Manggarai mengalami *fluktuasi* yang signifikan pada 6 (Enam) tahun terakhir. Kasus kematian Ibu pada Tahun 2018 sebanyak 6 kasus atau 98,36/100.000 KH dan pada Tahun 2019, jumlah kematian ibu meningkat menjadi 12 kasus atau 202,77/100.000 KH. Pada tahun 2020 jumlah kematian ibu mengalami penurunan menjadi 5 kasus atau 79,05/ 100.000 KH dan kembali meningkat ditahun 2021 yaitu 12 kasus atau 192,12/100.000 KH dan menurun pada tahun 2022 menjadi 7 kasus atau 116.4/100.000 KH dan kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 12 kasus atau 215.5/100.000 KH



Grafik di atas menunjukkan bahwa, angka kematian ibu terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu dengan 5 kasus kematian ibu, sedangkan kasus kematian ibu tertinggi terjadi pada Tahun 2019, 2021 dan 2023 yaitu 12 kasus kematian ibu dengan angka kematian tertinggi pada Tahun 2023 yakni sebesar 215,5/100.000 KH.

Faktor Utama Penyebab Kematian Ibu dari 12 kasus kematian ibu pada Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

- Hemoragic Post Partum (HPP) atau Perdarahan
 Hemoragic Post Partum adalah kehilangan darah ≥ 500 ml selama 24 jam pertama yang terjadi setelah kelahiran bayi, sebelum, selama dan sesudah keluarnya plasenta (Oxorn & Forte, 2010)
 Kasus kematian ibu karena Hemoragic post partum sebanyak 4 kasus atau 30% dari penyebab kematian. 2 Kasus terjadi di Puskesmas, 1 kasus kematian terjadi di Rumah Sakit dan 1 kasus terjadi dalam perjalanan merujuk pasien dari Puskesmas Ke RSUD Ruteng.
 Hemoragic Post Partum adalah kehilangan darah ≥ 500 ml selama 24 jam pertama yang terjadi setelah kelahiran bayi, sebelum, selama dan sesudah keluarnya plasenta (Oxorn & Forte, 2010)

Salah satu penyebab terjadinya Perdarahan adalah karena Atonia Uteri. Atonia Uteri adalah kegagalan myometrium untuk berkontraksi setelah persalinan sehingga uterus dalam keadaan relaksasi penuh, melebar, lembek, dan tidak mampu menjalankan fungsi oklusi pembuluh darah. Perdarahan berasal dari pembuluh darah yang terbuka pada bekas menempelnya plasenta yang lepas sebagian atau lepas keseluruhan, hal ini bisa disebabkan karena kelelahan atau faktor predisposisi lainnya seperti Ibu yang mengalami persalinan lama, grandemultipara, atau peregangan uterus yang berlebihan akibat hidramnion, janin kembar dan faktor lainnya.

- Emboli Air Ketuban: 2 kasus

Emboli Air Ketuban adalah suatu kondisi Ketika air ketuban masuk dan bercampur dalam system peredaran darah sang ibu. Kondisi ini umumnya sulit dicegah dan berisiko menimbulkan komplikasi yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Biasanya terjadi secara tiba-tiba dan penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Pada tahun 2023 ini, terdapat 2 kasus Kematian Ibu karena Emboli air ketuban.

- Hepatomegali: 2 Kasus

Hepatomegali adalah suatu kondisi dimana terjadi pembesaran organ hati melebihi ukuran normal. Kondisi ini merupakan gejala gangguan pada hati atau organ yang terkait dengan hati seperti kantong empedu yang bisa menyebabkan keluhan berupa, perut membesar, nyeri di perut kanan atas, atau penyakit kuning. Penyakit ini disebabkan karena Infeksi dari organ lain, seperti tipes atau demam tifoid. Abses hati atau kista hati. Penyakit perlemakan hati akibat minuman beralkohol atau NASH (non-alcoholic fatty liver disease) Tumor, kanker hati, atau penyebaran (metastasis) kanker dari organ lain ke hati. Pembesaran hati perlu segera ditangani karena bisa menjadi tanda dari kondisi berbahaya seperti gagal jantung atau kanker. Pada tahun 2023 ini, terdapat 2 kasus Kematian Ibu dengan Hepatomegali.

- Pre Eklampsia atau Eklampsia: 1 kasus

Pre-eklampsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih disertai protein uria dan atau

oedema pada kehamilan 20 minggu atau lebih, kejang, pandangan kabur dan dapat disertai koma. Kondisi preeklamsia pada ibu hamil harus segera ditangani. Karena ibu dengan pre eklampsia memiliki pembuluh darah yang tidak berfungsi dengan normal, karena bentuk yang lebih sempit dan merespons sinyal hormonal secara berbeda yang menyebabkan aliran darah yang masuk ke plasenta menjadi terbatas yang berakibat fatal baik bagi ibu maupun bagi janinnya. Pada tahun 2023 ini, terdapat 1 kasus Kematian Ibu dengan Pre Eklampsia

- **Pneumonia: 1 Kasus**

Pneumonia atau radang paru adalah kondisi inflamasi saat seseorang mengalami infeksi pada kantung-kantung udara dalam paru-paru yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri *Streptococcus Pneumonia*, virus, atau jamur. Kondisi ini dapat menyebabkan batuk berdahak atau bernanah, demam, menggigil, hingga kesulitan bernapas hingga henti napas. Seseorang yang terserang pneumonia akan mengalami gangguan pada fungsi paru-paru, sehingga menyebabkan tubuh kehilangan oksigen. Kondisi ini menyebabkan sel-sel organ menjadi terganggu. Jika tidak ditangani segera dengan tepat dapat mengakibatkan komplikasi yang fatal. Pada tahun 2023 ini, terdapat 1 kasus Kematian Ibu karena Pneumonia

- **Gagal Ginjal: 1 kasus**

Gagal ginjal merupakan kondisi di mana satu atau kedua ginjal tidak dapat lagi berfungsi dengan baik. Terkadang, gagal ginjal bersifat sementara dan muncul dengan cepat. Namun di lain waktu, gagal ginjal juga dapat menjadi kondisi kronis yang akan memburuk secara perlahan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, gagal ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni gagal ginjal kronis dan akut. Gagal ginjal dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti: Anemia. Ketika ginjal tidak bekerja secara tidak optimal, tubuh berisiko tidak dapat membuat sel darah merah dengan baik. Akibatnya, pengidap gagal ginjal rentan untuk mengalami anemia.

Kelemahan Tulang. Adanya kerusakan pada ginjal dapat mengganggu keseimbangan mineral seperti fosfor dan kalsium dalam tubuh. Ketidakseimbangan tersebut dapat menyebabkan tulang melemah.

Retensi Cairan. Jika ginjal tidak dapat menyaring air secara memadai dari darah, pengidap gagal ginjal berisiko mengalami retensi cairan, terutama di tubuh bagian bawah.

Penyakit Jantung. Penyakit jantung dapat menyebabkan gagal ginjal, dan gagal ginjal yang tidak mendapatkan perawatan tepat juga bisa menyebabkan penyakit jantung.

Hiperkalemia. Gagal ginjal dapat menyebabkan hiperkalemia, atau peningkatan kadar kalium. Dalam kasus yang parah, hiperkalemia juga dapat menyebabkan gagal jantung sebagai komplikasinya.

Asidosis Metabolik. Fungsi ginjal yang terganggu dapat menyebabkan asidosis metabolik, di mana cairan tubuh pengidap gagal ginjal mengandung terlalu banyak asam. Asidosis metabolik dapat menyebabkan komplikasi seperti batu ginjal atau penyakit tulang.

Komplikasi Sekunder. Banyak orang dengan gagal ginjal mengalami beberapa komplikasi sekunder. Misalnya seperti depresi, gagal hati, penumpukan cairan di paru-paru, kerusakan saraf, hingga infeksi kulit.

Pada tahun 2023 ini, terdapat 1 kasus Kematian Ibu dengan Gagal Ginjal Akut

- Syok Sepsis: 1 Kasus

Syok septik adalah kondisi darurat yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh infeksi lokal maupun total sehingga menimbulkan kerusakan organ bahkan kematian. Penanganan darurat berupa penggunaan oksigen tambahan, cairan intravena, antibiotik, dan obat-obatan lainnya. Sepsis yang tidak segera ditangani dan memburuk dapat membuat tekanan darah turun drastis serta berisiko tinggi menyebabkan kematian. Kondisi ini ditandai dengan demam menggigil atau hipotermia, takikardia, sesak napas, kulit dingin dan pucat, nadi lemah, serta penurunan kesadaran. Pada tahun 2023 ini, terdapat 1 kasus Kematian Ibu dengan Syok Sepsis

Penyebab lain dari kematian ibu yang terjadi disebabkan oleh karena faktor 4 Terlalu (Telalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan Terlalu Banyak) dan 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan, terlambat mencari tempat rujukan dan terlambat mendapat penanganan)

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Manggarai untuk menurunkan AKI antara lain:

1. Mendukung Upaya provinsi NTT melalui kegiatan Revolusi KIA yang mewajibkan semua Ibu bersalin untuk melahirkan di Fasilitas kesehatan memadai. Namun dari 5606 persalinan, masih ada 95 persalinan yang terjadi dirumah dan 58 persalinan ditolong oleh dukun.
2. Kabupaten Manggarai melalui Dinas Kesehatan telah menyediakan tempat tunggu kelahiran (TTK) yang beralamat di Nekang Ngencung RT/RW 018/005 Kelurahan Watu.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, alat dan obat-obatan emergensi melalui usulan pengadaan
4. Menyediakan transport rujukan pelayanan ibu melahirkan
5. Melaksanakan *On The Job training* kasus kegawatdaruratan ibu dan anak bagi dokter, bidan, dan perawat di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke RS
6. Menyediakan Biaya Transportasi Rujukan Ibu dan Bayi Baru Lahir.
7. Whatsapp grup (WAG); Sistem Informasi Cepat terkait kasus kegawatdaruratan bersama Bidan Puskesmas dan Petugas RS
8. Melaksanakan Kegiatan Supervisi Fasilitatif dan Pembinaan Pelayanan ante natal care (ANC), Post Natal care (PNC) dan Bayi Baru Lahir

Angka Kematian ibu menjadi salah satu indikator utama pembangunan kesehatan di Kabupaten Manggarai sehingga menjadi gambaran dari keberhasilan program pembangunan kesehatan dan penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan.

2) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) mencerminkan derajat kesehatan masyarakat yang sekaligus juga mencerminkan umur harapan hidup pada saat lahir. AKB yaitu jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Kematian Bayi yang terjadi di Kabupaten Manggarai tersebar pada beberapa Puskesmas, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Jumlah Kematian Bayi menurut Kecamatan dan Puskesmas
di Kabupaten Manggarai Tahun 2023**

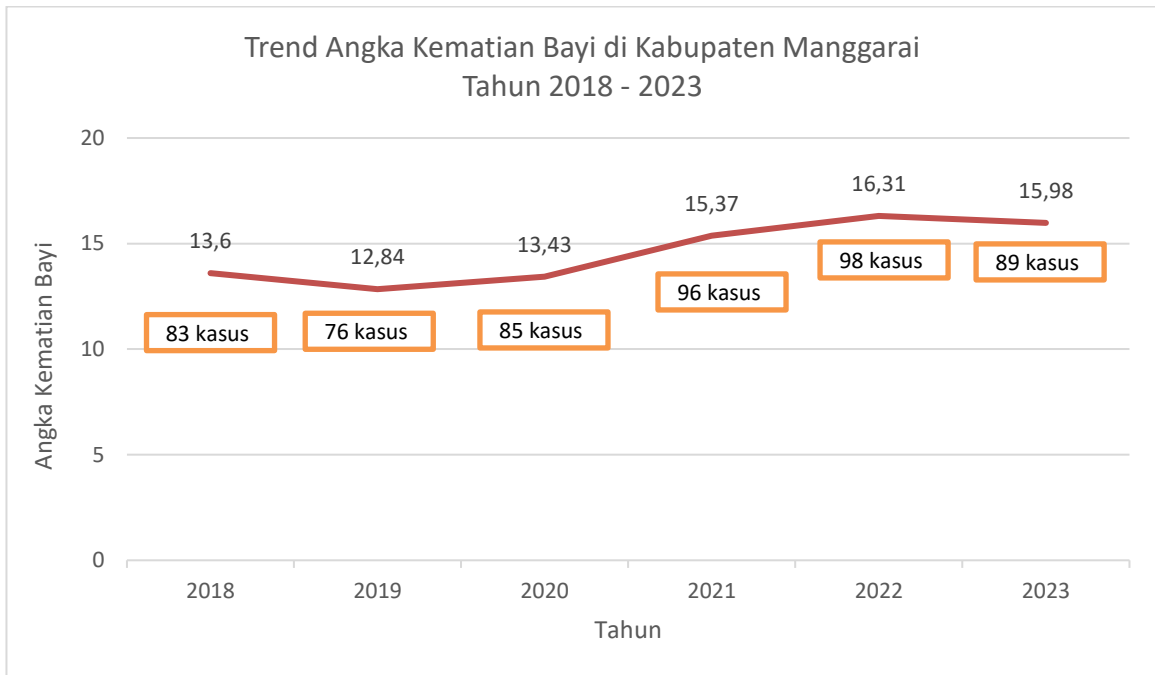
NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	LAHIR HIDUP	JUMLAH KASUS
1	Ruteng	Cancar	275	8
		Wae Mbeleng	225	6
		Anam	156	2
2	Rahong Utara	Nanu	209	0
		Wangko	191	4
3	Lelak	Ketang	196	3
4	Wae Ri'i	Watu Alo	100	3
		Bangka Kenda	255	2
		Timung	163	4
5	Langke Rembong	Kota	577	2
		Lao	481	4
6	Cibal	Pagal	331	7
		Bea Mese	165	3
7	Cibal Barat	Wae Codi	329	5
8	Reok	Reo	371	6
9	Reok Barat	Wae Kajong	84	2
		Loce	96	2
		Lemarang	84	3
10	Satar Mese	Iteng	175	5
		Ponggeok	317	2
		Langgo	112	1
11	Satar Mese Barat	Narang	149	2
		Dintor	149	4
12	Satar Mese Utara	Langke Majok	237	2

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	LAHIR HIDUP	JUMLAH KASUS
		Todo	142	5
	JUMLAH KASUS		5569	89
	AKB= 89/5569 X 1000 = 15.98/ 1000 KH			

Sumber Gambar: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Manggarai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kematian bayi yang terjadi pada Tahun 2023 tersebar di seluruh Puskesmas di Kabupaten Manggarai. Kasus kematian bayi tertinggi terdapat pada wilayah Kecamatan Ruteng sebanyak 16 kasus (Puskesmas Cancar 8 kasus, Puskesmas Anam 6 Kasus dan Puskesmas Wae Mbeleng 2 kasus), disusul Kecamatan Cibai sebanyak 10 kasus (Puskesmas Pagal 7 Kasus, Puskesmas Beamese 3 kasus), disusul Kecamatan Wae Rii sebanyak 9 kasus (Puskesmas Timung 4 Kasus, Bangka Kenda 2 kasus, Puskesmas dan Watu Alo 3 kasus) dan Kecamatan Satar Mese sebanyak 9 kasus (Puskesmas Iteng 3 kasus, puskesmas Ponggeok 5 kasus, puskesmas Langgo 1 kasus) Selanjutnya Satar Mese Utara (Puskesmas Langke Majok 2 kasus dan Puskesmas Todo 5 kasus), Kecamatan Reok Barat 7 kasus (Wae Kajong 2 kasus, Loce 2 kasus, Lemarang, 3 kasus). Kecamatan Langke Rembong (Puskesmas Lao 4 kasus dan Puskesmas Kota 2 kasus) total 6 kasus, Kecamatan Reok 6 kasus, Kecamatan Satar Mese Barat 6 kasus (Narang 2 kasus, Dintor, 4 kasus) Rahong Utara dan Cibai Barat masing-masing 5 Kasus dan Kecamatan Lelak 3 kasus,

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Manggarai cenderung meningkat pada 6 (Enam) tahun terakhir. Kasus kematian bayi pada Tahun 2018, jumlah kematian bayi 83 kasus atau 13,60/1.000 KH. Pada tahun 2019 jumlah kematian bayi mengalami penurunan menjadi 76 kasus atau 12,84/ 1.000 KH dan kembali meningkat ditahun 2020 yaitu 85 kasus atau 13,43/1.000 KH meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 96 kasus atau 15,37/1000 KH dan meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 98 kasus atau 16.31/1000 KH, sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 89 kasus atau 15.98/1000 KH.



Grafik di atas menunjukkan bahwa trend angka kematian bayi di Kabupaten Manggarai cenderung meningkat, dengan kasus terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu ditemukan 76 kasus kematian bayi, dan kasus kematian bayi tertinggi terjadi pada Tahun 2022 dengan jumlah kasus 98 kasus. Pada Tahun 2023, angka kematian bayi mengalami penurunan sebesar 9 poin atau penurunan 10% dibandingkan dengan Tahun 2022.

Penyebab utama dari 89 kasus kematian bayi yang terjadi pada Tahun 2023 adalah Asfiksia, Prematur dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), Pneumonia, kelainan bawaan dan Sepsis serta beberapa penyebab lainnya, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- Asfiksia merupakan keadaan dimana bayi tidak dapat bernapas spontan setelah bayi lahir. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir umumnya akan mengalami asfiksia pada saat lahir. Masalah ini berhubungan erat dengan gangguan kesehatan ibu hamil, kelainan tali pusat, atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama dan sesudah persalinan. Pada tahun 2023 ini, terdapat 33 kasus Kematian Bayi dengan penyebab Asfiksia atau 37% dari total kematian bayi.
- BBLR yaitu berat badan bayi baru lahir kurang dari 2500 gram yang ditimbang segera setelah lahir. Adapun penyebab BBLR antara lain karena kelahiran prematur, faktor ibu seperti umur, paritas, dan gizi selama hamil, komplikasi kehamilan, kehamilan kembar, dan lain sebagainya. Pada umumnya, bayi yang lahir prematur/ kurang dari

usia 37 minggu kehamilan memiliki berat lahir yang lebih rendah dari bayi normal. Kematian bayi dengan BBLR ada 18 kasus atau 20% dari total kematian bayi, 9 diantaranya karena prematuritas.

- Pneumonia yaitu kondisi dimana seseorang mengalami infeksi virus, bakteri dan jamur yang menimbulkan peradangan pada kantung udara disalah satu atau kedua sisi paru-paru. Kantung udara bisa berisi cairan atau pus (dahak purulent) yang dapat mengancam jiwa terutama pada bayi dan anak. Pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian pada 9 orang bayi atau 10% dari total kematian bayi.
- Kelainan bawaan merupakan kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan hasil konsepsi. Penyebabnya adalah faktor genetik dan mekanik, seperti infeksi kehamilan, konsumsi obat-obatan, radiasi, hormonal. Kelainan bawaan menjadi salah satu penyebab kematian pada 9 orang bayi.
- Sepsis adalah infeksi berat yang dapat menyebabkan komplikasi yang serius pada paru-paru, ginjal, otak dan pendengaran bahkan kematian. Sepsis menjadi salah satu penyebab kematian pada 4 orang bayi.
- Penyebab lain-lain seperti, Masalah Laktasi (2 Kasus), Febris (1 kasus), MAS (*Meconium Aspirasi Syndrom*) (2 kasus), Diare (1 kasus), gangguan pernapasan (7 kasus), Susp Aspirasi (2 kasus), dan Kejang (1 kasus), total 16 kasus..

Selain itu, faktor-faktor lain yang dapat menjadi penyebab kematian bayi adalah status gizi ibu hamil atau adanya penyakit penyerta ibu hamil, faktor lingkungan yang kurang mendukung ibu hamil, kurangnya pendidikan masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat serta akses pelayanan yang masih sangat terbatas. Disamping itu juga peran lintas sektor dalam pendampingan ibu hamil dan pemberdayaan masyarakat dalam KIA yang belum optimal.

3) Angka Kesakitan

Indikator angka kesakitan dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan yang membatasi aktifitas, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Manggarai.

Pada tahun 2023, angka kesakitan di kabupaten Manggarai tercatat sebesar 74.561 kunjungan atau 22,54% penduduk dari target 21,8%, yang menunjukkan bahwa

angka kesakitan kabupaten Manggarai masih lebih tinggi dari target yang diharapkan.

Tabel 3.1 Jumlah 10 Patron Penyakit terbesar di Kabupaten Manggarai Tahun 2023

No	Nama Penyakit	Jumlah	%
1	Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas	30,897	24,44
2	Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat	24,110	19,07
3	Penyakit tekanan darah tinggi	19,087	15,10
4	Penyakit kulit dan jaringan subkutan	8,546	6,76
5	Penyakit rongga mulut	6,724	5,32
6	Penyakit infeksi pada usus	5,365	4,24
7	Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan bawah	3,462	2,74
8	Penyakit pada saluran kencing	2,235	1,77
9	kecelakaan dan keracunan	1,510	1,19
10	Penyakit virus	1214	0,96
11	Penyakit lainnya	23,252	18,40
	Total	126,402	

Tabel di atas menunjukkan jumlah kasus yang menjadi keluhan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas sepanjang tahun 2023. Gambaran jumlah kasus ini lebih banyak dari jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, karena 1 orang pasien bisa mengalami lebih dari 1 keluhan kesehatan pada saat kontak dengan fasilitas kesehatan. Kasus ISPA masih merupakan kasus terbanyak yang terjadi di masyarakat yaitu sebesar 24,44% kasus kesakitan.

4) Angka Kematian Balita

Angka kematian Balita merupakan ukuran jumlah kasus kematian Balita usia 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama. Sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Manggarai tidak ditemukan kematian balita, sehingga capaian ini sesuai dengan target kinerja Tahun 2023 yaitu tanpa kematian Balita.

5) Persentase Kecamatan terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI

STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan agar mencapai 5 pilar STBM

GESI yang meliputi perilaku pilar 1) Stop Buang air besar sembarangan, pilar 2) cuci tangan pakai sabun, pilar 3) Pengelolaan air minum dan makanan dengan benar, pilar 4) Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan pilar 5) pengelolaan limbah cair rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan.

Pada tahun 2023 tidak dilakukan proses verifikasi pelaksanaan STBM di tingkat kecamatan. Sehingga capaian indikator kinerja kecamatan terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM tidak tercapai. Sedangkan upaya promosi pelaksanaan STBM di Puskesmas terus dilakukan untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat sehingga dapat mengimplementasikan STBM dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mencapai 5 pilar STBM, maka harus melibatkan semua unsur yang ada di kecamatan dan desa serta semua elemen dalam masyarakat sehingga membentuk perubahan perilaku yang positif. Sampai tahun 2022 hanya 2 pilar yang sudah mencapai 100 % yaitu pilar 1 dan pilar 2 untuk pencapaian pilar 3, 4 dan 5 Pemkab dan masyarakat Manggarai harus bekerjasama dalam upaya mensukseskan Persentase Kecamatan terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI.

a. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya;

Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Table 3.2 Capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	<i>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</i>	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	76,05/ 100.000 KH	116,49/ 100.000 KH	47,72	75,2/100 .000 KH	215,48/ 100.000 KH	-86,54
		Menurunkan Angka Kematian bayi (AKB)	12,36/ 1.000 KH	16,31/ 1.000 KH	68,48	11,8/1.0 00 KH	15,98/ 1.000 KH	64,57
		Menurunkan Angka Kesakitan	22,7%	23,76	95,28	21,8%	22,54%	96,59
		Menurunkan Angka Kematian Anak dan Balita	0/1.000KH	0/1.000 KH	100	0/1.000 KH	0/1.000 KH	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Persentase Kecamatan Terverifikasi Melaksanakan 5 Pilar STBMGESI	2 Kec	16,67%	16,67	100%	0	0
Rata-Rata			65,64			35,11		

Capaian Kinerja Indikator Angka Kematian ibu (AKI) pada Tahun 2023 mengalami penurunan signifikan dari Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 136% dari 47,72% pada Tahun 2022 menjadi -86,54 % pada tahun 2023.

Capaian Kinerja Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2023 adalah jumlah kasus kematian sebanyak 89 Kasus dengan capaian kinerja 64,57 dari target. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, capaian tahun 2023 mengalami peningkatan 1,5% dari 68,48% menjadi 64,57%.

Capaian Kinerja Indikator Angka Kesakitan pada tahun 2023 adalah 96,59% dengan jumlah angka kesakitan sebanyak 74.561 atau 22,54% dari jumlah penduduk 333.730. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja pada tahun 2023 mengalami penurunan angka kesakitan sebesar 1,22% dari 23,76% di Tahun 2022.

Capaian Kinerja Indikator Angka Kematian Balita pada tahun 2023 sudah mencapai target dimana tidak dilaporkan adanya kematian Balita sepanjang tahun.

Capaian Kinerja Indikator Persentase Kecamatan Terverifikasi Melaksanakan 5 Pilar STBMGESI pada Tahun 2023 adalah 0% atau tidak mencapai target karena tidak dilakukan verifikasi kecamatan yang melaksanakan 5 pilar STBM.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas pembantuan dari Kementerian/lembaga yang Ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun Anggaran 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai tidak mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan dari Kementerian atau Lembaga.

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas Pembantuan Dari Daerah Provinsi yang Ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun Anggaran 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai tidak mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM KESEHATAN

4.1 Urusan Kesehatan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

4. Pelayanan kesehatan balita;

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan

dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

Pelayanan kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dilakukan oleh minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.

11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang

melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

4.1.2 Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh OPD

Target dan realisasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang menjadi kewenangan dinas kesehatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Tabell 4.1 Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM								79%	Tuntas Pratama
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	100	65	65%	100	73	73%	66%	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	100	77	77%	100	87	87%	79%	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	100	77	77%	100	78	78%	77%	
4	Pelayanan kesehatan balita;	100	70	70%	100	77	77%	71%	

5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	100	89	89%	100	63	63%	84%	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	100	88	88%	100	72	72%	85%	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	100	59	59%	100	68	68%	61%	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	100	100	100%	100	89	89%	98%	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	100	100	100%	100	98	98%	100%	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	100	69	69%	100	86	86%	73%	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;	100	72	72%	100	86	86%	75%	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	83	83%	100	95	95%	85%	

4.1.3 Anggaran dan Realisasi

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 172.103.296.138,- dan besaran anggaran yang dialokasikan untuk intervensi standar pelayanan minimal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	2.547.210.725
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	3.168.683.000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	917.564.000
4	Pelayanan kesehatan balita;	3.628.789.750
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	1.229.970.071

6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	11.886.322.600
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	657.763.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	1.168.584.000
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	1.030.000.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	2.295.520.000
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;	2.216.321.900
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	1.732.235.600
TOTAL		32.478.964.646

4.1.4 Dukungan Personil

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan salah satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional yang mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Data kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4.3 Data Ketenagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Keadaan Desember Tahun 2023

No	Jenis Tenaga	PANGKAT / GOL. RUANG AKHIR									PENDIDIKAN										
		Go II	Gol II	Gol III	Gol IV	VI I	IX	X	Non ASN	Jumlah	S D	SM P	SMA/ Sedraj at	D- I	D-III	S1/ D- IV	S 2	Profe si	Dokter Non PNS/No n PTT	Nusanta ra Sehat	Jumlah
1	Pejabat Struktural			1	6					7					1	2	2	2			7
2	Fungsional Umum				0					0					0	0					0
3	Fungsional Penyetaraan			8	3					11					1	9	1				11
3	Apoteker			24	3		1		12	40						40					40
4	Asisten Apoteker		26	7		2			8	43					43						43
5	Bidan		28	189	4	32	19		577	849					781	68					849
6	Gokter Gigi			6	9				6	21								21			21
7	Dokter			20	2				11	33								33			33
8	Epidemiologi			1	2					3						3					3
9	Fisioterapi			2					2	4					4						4
10	Nutrisionis		20	25	1	2	3		25	76					51	25					76
11	Penyuluh Kesehatan		3	36	1		8		41	89						88	1				89
12	Perawat		29	214	5	32	5	25	440	750					448	302					750

13	Perawat Gigi		14	28		3			9	54					54						54			
14	Rekam Medis		11						1	12					12						12			
15	Pranata Labkes		18	13		11	1		32	75					73	2					75			
16	Radiografer			1						1					1						1			
17	Sanitarian		20	24		1			13	58					58						58			
18	Teknisi Elektromedis			1			1		1	3					1	2					3			
	D-III Transfusi Darah								1	1					1						1			
	S-2 Umum								1	1							1				1			
19	S-1 Umum			3	3				8	14						14					14			
20	D-III Umum			1					4	5					5						5			
21	D-I								1	1				1							1			
21	SMA sederajat		4	4					55	63			63								63			
22	SMP/SLTP								7	7		7									7			
23	SD								2	2	2										2			
TOTAL		0	173	608	39	83	3	2	8	5	1257	2223	2	7	63	1	153	4	555	5	56	0	0	2223

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, dalam rangka upaya mencapai target kinerja ditemukan permasalahan dan kendala yang menjadi tantangan dalam pencapaian target kinerja dari setiap bidang pelaksana sebagai berikut:

1. Permasalahan Bagian Kesehatan Masyarakat.
 - Keterbatasan waktu narasumber/fasilitator kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan
 - Keterbatasan informasi terkait kurikulum pelatihan
 - Keterlambatan pencairan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan
 - Juknis DAK Non Fisik yang mengharuskan pelaksana kegiatan terbatas pada ASN, sedangkan Sebagian besar staf bidang Kesehatan masyarakat didominasi tenaga non ASN sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan
2. Permasalahan Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit.
 - Rendahnya penemuan suspect TB karena tidak dilakukannya skrining di daerah populasi kunci (Asrama, Seminari, Biara, Rutan/lapas)
 - Angka utilitas penggunaan TCM rendah dikarenakan stock cartridge yang terbatas dari provinsi dan tidak ada pengadaan dari daerah.
 - Terbatasnya Faskes TCM.
 - Kurangnya pelatihan peningkatan pengetahuan petugas contohnya dalam hal teknis dan penggunaan aplikasi SITB dan E-SISMAL .
 - Kurangnya alat dan perangkat untuk mengakses internet sehingga pelaporan sering kali tidak terinput dan pelaporan tidak tepat waktu.
 - Kurangnya kerja sama lintas sector
 - Kurangnya alkes khususnya alat vaccine Refrigerator
 - Keterlambatan pendistribusian obat dan BMHP khususnya Stik PTM, RDT dan tidak tersedianya obat Chlorpromazine

3. Permasalahan Bidang Sumber Daya Kesehatan

- Tidak adanya Kegiatan Pendamping yang dapat dibiayai dari Dana Alokasi Umum untuk menunjang kegiatan yang dibiayai DAK NON FISIK sehingga masih terdapat kegiatan yang "pincang" dalam proses rencana tindak lanjutnya.
- Untuk Kegiatan Pengadaan Obat, BMHP dan Alat Kesehatan Secara Volume dan Capaian Output sudah hampir memenuhi hanya untuk Silpa Anggaran terjadi karena adanya perubahan pada harga yang ditayang pada E-Katalog saat proses kontrak berlangsung dengan saat perencanaan awal juga untuk sebagian realisasi yang tidak terpenuhi secara output dan anggaran karena Adanya Kendala Teknis di Utilities Produksi.

4. Permasalahan Bidang Pelayanan Kesehatan.

- Masih rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- Belum optimalnya akses pelayanan Dokter Spesialis di Daerah Terpencil dan Kepulauan.
- Belum semua Kepala Puskesmas mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas.
- Kerjasama lintas program belum berjalan optimal terutama terkait pembangunan Puskesmas Baru.
- Adanya mutasi petugas pengelola program pelayanan kesehatan pada puskesmas tertentu, sehingga tidak ada kesinambungan dalam pemahaman pengisian registrasi dan form pencatatan dan pelaporan.
- Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) belum berjalan optimal.
- Masih ada Faskes seperti Pustu dan Poskesdes termasuk termasuk rumah dinas paramedis dalam kondisi rusak ringan, sedang dan berat.
- Tingginya permintaan masyarakat untuk pelayanan kesehatan sosial, namun tidak diimbangi dengan dana yang tersedia.

- Ketersediaan Obat dan BMHP JKN tidak bisa menjawab kebutuhan saat pelayanan berlangsung karena Obat dan BMHP tidak tersedia, karena proses pengadaan Obat/BMHP melalui tender oleh pihak ke 3, kadang terlambat di penghujung tahun.
5. Permasalahan Bagian Sekretariat
- Pengiriman data kepegawaian dari puskesmas sering terlambat dan terkadang tidak dikirim;
 - Proses pengusulan SK pensiun bagi ASN yang akan pensiun sering terlambat karena kurangnya kesadaran pegawai yang bersangkutan untuk menyiapkan berkasnya;
 - Proses kenaikan pangkat dan berkala sering terlambat karena kendala teknis seperti kelalaian ASN untuk melengkapi berkas;
 - Penggunaan kendaraan operasional terkadang kurang diperhatikan.
 - Kualitas jaringan internet masih kurang memadai sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara online
 - Kurangnya ketersediaan peralatan kerja seperti laptop dan printer sehingga mengganggu kelancaran penyelesaian pekerjaan
 - Petugas perencana baik di tingkat dinas kesehatan maupun di tingkat puskesmas belum pernah mengikuti pelatihan perencanaan sehingga mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan

B. Solusi

1. Bidang kesehatan masyarakat

- Membuat jadwal terstruktur terkait kegiatan yang membutuhkan narasumber/fasilitator kegiatan
- Mencari informasi dari berbagai pihak terkait kurikulum pelatihan
- Merencanakan kegiatan secara terstruktur agar pengajuan keuangan untuk bisa sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan
- Ikut serta melibatkan seluruh staf Non ASN dalam kegiatan yang dilaksanakan bidang Kesehatan Masyarakat.

2. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit

- Mengusulkan alokasi dana untuk scrining TBC didaerah populasi
- Mengusulkan pengadaan catrdige dengan tujuan meningkatkan utilitas penggunaan TCM yang bersumber dari APBD.
- Mengusulkan penambahan tempat/faskes yang menggunakan TCM
- Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan petugas.
- Mempercepat pengadaan obat dan BMHP seperti Stick PTM dan RDT agar penjangiran dapat berjalan optimal dan tidak menumpuk di akhir tahun dan Mengusulkan pengadaan obat Chlorpromazine yang bersumber dari APBD dan mendiskusikan untuk penggantian regimen terapi obat dengan dokter jika memungkinkan.

3. Bidang Sumber Daya Kesehatan

- Tetap direncanakan serta dialokasikan anggaran untuk kegiatan pendamping dari DAU guna menunjang output yang lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat mengingat kegiatan yang dibiayai dari DAK tidak fleksibel atau terikat juknis.
- Untuk SILPA Anggaran jika memungkinkan dapat digunakan untuk pembelanjaan di tahun mendatang dan untuk pembelanjaan yang disebabkan kekosongan produksi sebaiknya disarankan proses kontrak dilakukan di awal agar mengantisipasi kendala teknis oleh satu penyedia dengan penyedia lainnya.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

- Melakukan bimbingan teknis ke puskesmas secara lintas program dalam rangka memberikan arahan/bimbingan kepada staf puskesmas sehingga mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat tercapai optimal.
- Mengalokasikan anggaran yang cukup memadai untuk pelayanan Dokter Spesialis ke daerah terpencil dan kepulauan.

- Membuat usulan pelatihan ke Dinas Kesehatan Provinsi NTT bagi Kepala Puskesmas yang belum mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas.
- Mengoptimalkan kerjasama lintas program.
- Mengadakan pelatihan bagi tenaga kesehatan/ pengelola program pelayanan kesehatan di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- Memberikan himbauan/ penegasan kepada semua Puskesmas agar membuat Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tahunan secara rutin dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.
- Membuat usulan dana untuk rehabilitasi atau pembangunan baru bagi Faskes dengan kondisi rusak ringan, sedang dan berat.
- Mengalokasikan dana yang cukup memadai untuk pelayanan kesehatan sosial sehingga dapat mengakomodir permintaan masyarakat.
- Pelaksanaan tender pengadaan Obat dan BMHP JKN agar dilakukan lebih awal dalam tahun berjalan sehingga bisa menjawab kebutuhan obat bagi peserta JKN sesuai waktu pelayanan.
- Perlu dilakukan pembenahan sistem rujukan pasien umum maupun pasien JKN sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

5. Sekretariat

- Membuat pengesahan ke seluruh UPTD Puskesmas;
- Perlunya pengawasan secara berkala oleh Kepala Puskesmas;
- Pengiriman surat pemberitahuan secepat mungkin ke setiap Puskesmas;
- Pengawasan secara berkala untuk pengarsipan surat menyurat serta pendistribusian surat-surat sesuai disposisi;
- Pengawasan agenda surat masuk dan keluar secara berkala;

- Pengawasan penggunaan kendaraan operasional sebelum dan setelah pelaksanaan tugas;
- Penambahan ASN di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan.
- Mengusulkan penyediaan peralatan kerja melalui dana APBD
- Penambahan ASN di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan serta mengusulkan pembekalan bagi petugas perencana, baik di dinas kesehatan maupun di puskesmas

4.2 Program dan Kegiatan Serta Realisasi Tahun Anggaran 2023

Tabel 4.2 Realisasi Program dan kegiatan Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					172,103,296,138	150,341,529,439	87,36
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					56,721,677,800	53,696,693,339	94,67
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8,545,610	3,680,000	43,06
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100%	8,545,610	3,680,000	43,06
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					55,712,832,190	52,903,289,858	94,96
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1050 orang	1050 orang	100%	55,648,632,190	52,840,339,858	94,95
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang menyediakan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	112 dokumen	112 dokumen	100%	64,200,000	62,950,000	98,05
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					145,120,000	140,616,318	96,90
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	4,040,000	3,945,000	97,65
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	15,564,000	15,260,000	98,05

No.	Program / Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	35,659,500	35,659,500	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 dokumen	0 dokumen	0%	1,740,000	0	0,00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	26 paket	26 paket	100%	64,966,500	63,475,900	97,71
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	2 laporan	13%	23,150,000	22,275,918	96,22
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					295,930,000	223,792,020	75,62
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850 laporan	850 laporan	100%	7,550,000	7,550,000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	100%	249,000,000	179,326,020	72,02
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	8 laporan	100%	39,380,000	36,916,000	93,74
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					559,250,000	425,315,143	76,05
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	495 unit	495 unit	100%	559,250,000	425,315,143	76,05
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					111,830,104,395	93,735,744,205	83,82
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					26,723,113,377	26,000,693,195	97,30
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit yang dibangun	1 unit	1 unit	100%	6,293,100,090	6,182,117,669	98,24
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 unit	3 unit	100%	1,525,552,449	1,332,887,534	87,37

No.	Program / Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Lainnya	yang Dibangun						
	Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 unit	3 unit	100%	420,510,000	420,418,700	99,98
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 unit	2 unit	100%	170,450,000	144,383,000	84,71
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1 unit	0 unit	0%	199,828,400	0	0,00
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg disediakan	Unit	Unit		11,822,768,892	11,783,257,234	99,67
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat, Vaksin yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	2,078,200,000	1,965,479,231	94,58
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	4,039,983,546	4,000,369,827	99,02
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya alat kesehatan yang berfungsi dengan baik	25 Unit	25 Unit	100%	30,120,000	29,300,000	97,28
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terdistribusinya Obat, BMHP dan Vaksin di FKTP	25 Paket	25 Paket	100%	142,600,000	142,480,000	99,92
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					85,106,991,018	67,735,051,010	79,59
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar	7,616 orang	7,616 orang	100%	2,547,210,725	2,215,603,375	86,98

No.	Program / Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7270 orang	7270 orang	100%	3,168,683,000	2,891,056,179	91,24
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6852 orang	6852 orang	100%	917,564,000	913,214,250	99,53
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7000 orang	7000 orang	100%	3,628,789,750	2,846,346,368	78,44
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36297 orang	36297 orang	100%	1,229,970,071	905,302,900	73,60
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	105,308 orang	105,308 orang	100%	11,886,322,600	11,729,021,742	98,68
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21,876 orang	21,876 orang	100%	657,763,000	645,013,000	98,06
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14,893 orang	14,893 orang	100%	1,168,584,000	1,159,527,200	99,22
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1,343 orang	1,343 orang	100%	1,030,000,000	1,025,470,000	99,56
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan gangguan jiwa berat yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	715 orang	715 orang	100%	2,295,520,000	1,929,931,500	84,07
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2,858 orang	2,858 orang	100%	2,216,321,900	1,346,980,000	60,78

No.	Program / Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9,759 orang	9,759 orang	100%	1,732,235,600	1,646,392,188	95,04
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%	32,745,000	32,745,000	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	1 dokumen	100%	204,130,000	198,035,155	97,01
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	100%	58,000,000	57,820,000	99,69
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100%	775,251,000	752,027,000	97,00
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25 dokumen	25 dokumen	100%	195,580,000	115,763,000	59,19
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah ODMK yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18,283 orang	18,283 orang	100%	30,000,000	28,030,000	93,43
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 dokumen	1 dokumen	100%	150,000,000	125,000,000	83,33
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25 dokumen	25 dokumen	100%	277,752,000	264,672,000	95,29
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat non kapitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25 dokumen	25 dokumen	100%	2,561,831,714	2,294,621,925	89,57
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kapitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23 dokumen	23 dokumen	100%	18,170,859,658	14,761,219,206	81,23
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	21 dokumen	21 dokumen	100%	27,866,605,000	18,652,350,966	66,93
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	1 dokumen	1 dokumen	100%	1,454,280,000	546,989,189	37,61
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas	Jumlah Fasilitas Kesehatan di	10 unit	10 unit	100%	565,852,000	369,376,686	65,28

No.	Program / Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang terakreditasi						
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	25 dokumen	25 dokumen	100%	285,140,000	283,930,000	99,58
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2,613,510,743	2,240,030,715	85,71
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2,613,510,743	2,240,030,715	85,71
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1571 orang	1571 orang	100%	2,613,510,743	2,240,030,715	85,71
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					350,142,000	339,942,980	97,09
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					86,598,000	77,698,000	89,72
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 sarana	30 sarana	100%	86,598,000	77,698,000	89,72
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					116,350,000	116,110,000	99,79

No.	Program / Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk makanan Minuman tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 dokumen	70 dokumen	100%	116,350,000	116,110,000	99,79
3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					147,194,000	146,134,980	99,28
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	28 unit	28 unit	100%	147,194,000	146,134,980	99,28
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					587,861,200	329,118,200	55,99
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					233,543,200	130,798,200	56,01
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	100%	233,543,200	130,798,200	56,01
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					354,318,000	198,320,000	55,97

No.	Program / Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 dokumen	2 dokumen	100%	354,318,000	198,320,000	55,97
TOTAL						172,103,296,138	150,342,917,258	87,36

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan ini menguraikan semua hasil pencapaian program dan pencapaian indikator pelayanan kesehatan tahun 2023. Dari uraian di atas masih ada beberapa program yang belum mencapai target Sementara penyerapan anggaran yang tersedia untuk beberapa kegiatan belum mencapai 100%.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, selaku penanggungjawab bidang pelayanan kesehatan sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu penyajian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Ruteng, Maret 2024


Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Manggarai,
dr. Bartolomeus Hermopan
Pembina
NIP.19760430 200903 1 002

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANGGARAI

